Konsorsium PERMAMPU

Suara PERMAMPU

Perempuan Sumatra, Otonom, Sehat, Kreatif

Newsletter VIII
Juli - Desember 2018



Hal. 3 Akuntabilitas



Hal. 12 FKPAR



Hal 20. FMS



Hal 26.
Cerita Perubahan



Kementerian PPN/ Bappenas

MAMPU
Kemitraan Australia - Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Konsorsium PERMAMPU

Konsorsium PERMAMPU

Suara PERMAMPU

Perempuan Sumatra, Otonom, Sehat, Kreatif

Pemimpin Redaksi	Dina Lumbantobing	Kontributor	Direktur Eksekutif
Sekretaris Redaksi	King Ronald Silalahi		Koord Program
Editor Tulisan	Dina Lumbantobing		Staf Lapang Lembaga Anggota

SEKRETARIAT PERMAMPU
Jl. Pancur Siwah No 1G Padang Bulan KM 8 Medan 20142 - Sumatera Utara
e-mail : konsorsiumpermampu@gmail.com Telp/Fax. 061-8361102
Facebook: PermampuConsortium www.permampu.org

Perempuan Sumatra, Otonom, Sehat, Kreatif

Selamat memasuki tahun yang baru: 2019.

Dalam semester kedua tahun 2018, kegiatan Permampu sangat diwarnai dengan pelaksanaan kegiatan yang mengarah ke Inovasi, yaitu memastikan **OSS&L (*Pusat Informasi & Pembelajaran Kesehatan Seksual dan Reproduksi)*** yang dikenal dengan berbagai nama antara lain Pusat Pengaduan dan berbasis Puskesmas telah dimulai dan berjalan baik. Ini adalah berkat kerjasama kelompok perempuan, DinKes/Puskesmas, dan FMS. Berkaitan dengan hal tersebut, juga mendorong Buku Pegangan Orang Tua untuk Pendidikan Ketubuhan dan Kesehatan Reproduksi Anak Dalam Keluarga telah mulai digunakan. Hal ini diupayakan melalui pemilihan Keluarga Peduli HKSR di semua Propinsi.

Di samping itu, Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput (FKPAR) dengan giat melakukan perbaikan keorganisasian melalui pergantian pengurus dan evaluasi serta perencanaan RK tahunan, di samping melaksanakan tugas advokasi di tingkat akar rumput. Sebagian dari FKPAR menjadi perempuan potensial, dan masuk menjadi Caleg di tingkat Kabupaten, bahkan Propinsi. Ini adalah wujud nyata dari kegiatan inovasi 4Ps (Pusat Pembelajaran Perempuan Potensial) yang telah berjalan secara organic melalui pendidikan kritis khususnya pendidikan politik di kelompok dampingan.

Forum Multi Stakeholder (FMS) telah semakin bergerak maju melalui advokasi, khususnya dalam memediasi kasus, menjadi fasilitator dan secara khusus di 4 propinsi (Aceh, SUMUT, SUMBAR & Lampung) terlibat dalam Advokasi SDGs/TPB.

Demikian juga halnya dengan FPM (Forum Perempuan Muda), yang giat dalam forum mereka untuk mendalami HKSR, dan bergabung dangan FKPAR dalam kampanye hak-hak perempuan khususnya HKSR dalam Peringatan 16 Hari Aktivisme.

Mari kita masuki tahun 2019 dengan harapan Perempuan Akar Rumput terpilih menjadi wakil-wakil rakyat yang membawa suara perempuan.

JANGAN GOLPUT, PILIH PEREMPUAN!!

Salam solidaritas.
Dina Lumbantobing.
Koordinator Pelaksana Permampu

DAFTAR ISI

1. Editorial
2. Salam Redaksi
3. Akuntabilitas
12. FKPAR
20. FMS
26. Cerita Perubahan

Kementerian PPN/ Bappenas
Australian Government
MAMPU Kemitraan Australia - Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Konsorsium PERMAMPU

Capaian Permampu

Periode 1 Juli 2018 s/d 31 Desember 2018

Dalam periode ini, Konsorsium Permampu telah melaksanakan berbagai kegiatan semester kedua yang merupakan bagian dari Rencana Kerja Tahunan 2018. Adapun indikator capaian untuk semester ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator Permampu Semester II Tahun 2018

Indikator	Jumlah	Jumlah anggota	
		Perempuan	Laki - Laki
1. Jumlah kelompok ekonomi • Jumlah kelompok (unit) • Total saham • Total pinjaman beredar	 562 Rp. 44.913.813.251 Rp. 48.437.969.303	21.207	0
2. Jumlah perempuan muda yang dilatih dan aktif	35 Kab/Kota	3.223	0
3. Terbentuk FKPAR (Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput) di tingkat Kabupaten/Kota	35 Kab/Kota	21.207	0
4. Terbentuk FMS (Forum Multi Stakeholder) di Kab/Kota (kab, pr, lk)	26 Kab/Kota	403	197
5. Jumlah Femokrat (Perempuan Peka Gender di Birokrat/Pejabat Publik)	26 Kab/Kota	288	0
6. Jumlah Perempuan korban KtP yang ditangani langsung	26 Kab/Kota	184	0
7. Jumlah perempuan difasilitasi mengakses layanan kesehatan	35 Kab/Kota	2263	0
8. Jumlah aparatur Pemerintah terlibat dalam program tingkat Desa/Kabupaten/Kota	35 Kab/Kota	604	326
9. Jumlah tokoh adat yang difasilitasi	26 Kab/Kota	11	38
10. Jumlah tokoh agama yang difasilitasi	26 Kab/Kota	40	95
11. Jumlah perempuan disabilitas yang dijangkau	26 Kab/Kota	19	0

Penjelasan capaian periode 1 Juli – 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

1) Meningkatnya kekuatan ekonomi kelompok perempuan melalui pendampingan Credit Union (CU) dan Koperasi terus meningkat dari 20.245 orang (549 kelompok) pada Juni 2018 menjadi 21.207 (562 kelompok) pada Desember 2018 yang tersebar di 35 Kabupaten/Kota wilayah dampingan di Sumatera.

   Jumlah saham dari Rp. 40.939.392.282 (Juni 2018) juga meningkat menjadi Rp. 44.913.813.251 (Desember 2018); sementara pinjaman beredar dari Rp. 43.153.969.980 (Juni 2018) menjadi Rp. 48.437.969.303. (Desember 2018).

   Jika dibandingkan dengan Juni tahun 2018, perkembangan jumlah anggota bertambah sebesar 4,7 %, pertambahan saham anggota mencapai 10 % dan peningkatan pinjaman yang beredar mencapai 12 %. Upaya untuk meningkatkan penguatan ekonomi dilaksanakan melalui pendampingan dalam pembukuan dan pengorganisasian kelompok. Permampu juga terus memotivasi perempuan akar rumput untuk berani memulai usaha dan juga memanfatkan pinjaman di CU untuk memulai usaha mikro khas perempuan baik usaha produksi pangan, usaha dagang, dan pertanian.

2) Jumlah perempuan yang mengakses layanan reproduksi seperti penyuluhan kesehatan, iva test, papsmear dan konsultasi KB di layanan kesehatan mencapai 2.263 orang. Upaya menjangkau kesadaran keluarga yang mempunyai anak usia di bawah 18 tahun telah semakin berjalan melalui penyadaran tentang HKSR dengan mendiskusikan Buku Pegangan Pendidikan Tubuh dan Kesehatan Reproduksi di Keluarga (baca: Pendidikan Sex dalam Keluarga) terutama melalui promosi HKSR dan pemilihan Keluarga HKSR. Keluarga HKSR telah terpilih di 19 Kabupaten.

   Penerapan model One Stop Service (OSS&L) HKSR telah dikembangkan di 23 Puskesmas yang tersebar di 8 Provinsi. Berdasarkan hasil evaluasi dan pembelajaran di tingkat Permampu terhadap pelaksanaan OSS&L menilai bahwa model OSS&L yang dikembangkan sejauh ini masih tetap sesuai dengan konsep inovasi dengan tetap memperhatikan perbaikan antara lain OSS&L secara jelas focus kepada perempuan dan perempuan muda, spesifik pada fungsi pembelajaran HKSR, membuat panduan kerja tim, koordinasi ada pada anggota Permampu, dan sosialisasi OSS&L kepada komunitas, serta perlunya dukungan pemerintah daerah, dll.

3) Permampu telah melakukan advokasi kebijakan untuk Pemenuhan HKSR Perempuan sebanyak 68 regulasi mencakup 24 MoU, 10 SK Pengangkatan, 7 Ranperdes, 5 Ranperda, 10 Perbup/Pergub, 10 dan lain-lain.

   Dari keseluruhan regulasi tersebut yang berhasil atau sudah disahkan oleh instansi terkait sebanyak 26 dokumen peraturan mencakup 6 SK (Tim Penyusunan RAD TPB/SDGs), 13 MoU (terkait kerjasama OSS&L), 3 Perda (salah satunya terkait Kesehatan Ibu Bayi baru Lahir di Kab. Aceh Utara), 2 Perbup/Gub (salah satunya terkait

pencegahan perkawinan pada usia anak di Kab. Seluma) dan 3 peraturan desa.

4) Perkembangan Advokasi TPB/SDGs yang Berperspektif Gender, Inklusif dan Transformatif.

- **Kota Banda Aceh**

Pada periode ini, Flower Aceh sangat intens terlibat dalam penyusunan RAD TPB/SDGs di Tingkat Provinsi Aceh dan 3 Kab/Kota terdiri dari Kota Banda Aceh, Kab. Pidie dan Aceh Utara. Keterlibatan formal Flower Aceh dituangkan dalam SK Kepala Daerah di masing-masing daerah.

Di tingkat Provinsi, Flower Aceh menyelenggarakan Review RAD SDGs Aceh dengan melibatkan tenaga pakar akademisi/aktivis perempuan, Unicef dan Natural Aceh (lembaga yang fokus di isu disabilitas). Selain itu, Flower ikut serta dalam kepanitiaan bersama pelaksanaan side event SDGs "Menterjemahkan TPB/SDGs untuk Pembangunan Ekonomi dan Masyarakat Aceh" dalam Aceh Economic Summit Tahun 2018.

Di Aceh Utara, Flower Aceh mengikuti Rapat Multipihak tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah oleh BAPPEDA Aceh Utara, di Kantor Sekdakab Aceh Utara, Kamis 8 November 2018. Sementara di Pidie dan Banda Aceh dilakukan kegiatan konsultasi publik dalam Forum Multistakholder (FMS) untuk memberikan masukan penyusunan RAD TPB/SDGs khususnya untuk Tujuan 1,3,4,5, dan 11.

- **Kab. Dairi**

Pesada bekerjasama dengan Bappeda Kab. Dairi untuk mendorong adanya kebijakan daerah untuk pelaksanaan SDGs di Kab. Dairi. Diawali dengan diskusi pemahaman SDGs bersama OPD. Dalam pertemuan ini dianggap penting adanya Rencana Aksi Daerah TPB yang berperspektif gender sebagai tindaklanjut dari Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017.

Pada tanggal 9-10 Juli 2018, Pesada bekerjasama dengan Bappeda Kab. Dairi menyelenggarakan Konsultasi Publik Multi Pemangku Kepentingan tentang "Meningkatkan Kepemimpinan Perempuan untuk Mewujudkan TPB Berperspektif Gender, Inklusif dan Transformatif". Pertemuan ini menghasilkan identifikasi masalah lokal dan strategi mengatasi khususnya Pilar Pemangunan Sosial TPB/SDGs. Pada pertemuan tersebut, perwakilan Bappeda menegaskan bahwa usulan dari NGO akan menjadi masukan bagi OPD dalam menyiapkan Draft RAD TPB Dairi. Pesada juga memfasilitasi diskusi regular mengenai SDGs di kelompok dampingan dan FKPAR mengenai tujuan 1-5 SDGs dihubungkan dengan persoalan perempuan (pertanian, pendidikan untuk perempuan, layanan kesehatan yang sesuai dengan SDGs).

Untuk memastikan tersusunnya Matrik Non Pemerintah sebagai bagian dari RAD TPB nantinya, telah dilakukan lokakarya penyusunan matriks 3 yang diikuti unsur NGO dan Ormas Perempuan di Kab. Dairi pada tanggal 13 Desember 2018 di Pusdipra Sidikalang. Salah satu tantangan

penyusunan RAD TPB Kab. Dairi adalah karena belum dilantiknya Bupati terpilih, sehingga penyesuaian dengan visi misi kerja Bupati terpilih belum dapat dibahas.

- **Kab. Padang Pariaman**

Pada Juni 2018, LP2M melaksanakan Konsultasi Daerah untuk Mewujudkan SDGs yang Responsif Gender, Inklusif, dan Transformatif di Kabupaten Padang Pariaman. Dalam pertemuan tersebut terindentifikasi issu khususnya pada Pilar Pembanguan Sosial dan rekomendasi untuk mengatasi isu masalah tersebut.

Hasil Konsultasi Daerah kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan kegiatan Penyusunan Roadmap SDGs pada 26-27 Desember 2018 dengan melibatkan 32 orang peserta (24 Pr. dan 8 Lk.) dari unsur Bapelitbangda, Kemenag, FKPAR, dan berbagai OPD di Kab. Padang Pariaman. Terdapat 2 isu utama yang menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti yaitu isu tentang gizi dan sanitasi yang dianggap berkontribusi sebesar 40% terhadap kemiskinan di Kab. Padang Pariaman. Untuk mengatasi hal tersebut peserta mengusulkan Program PAPA TAHAN BANTING (Padang Pariaman Tahan Pangan dan Bebas Stunting) dan Program Sanitasi. Direncanakan percontohan inovasi ini akan dijalankan di 5 Nagari Koto Tinggi, Toboh Ketek, Sungai Abang dan Aie Tajun yang termasuk dampingan LP2M.

- **Kab. Lampung Timur**

Untuk memperkuat komitmen Pemerintah Kab. Lampung Timur dalam melaksanakan Tujuan Pembanguan Berkelanjutan. Damar Lampung telah menyelenggarakan beberapa rangkaian Konsultasi Publik untuk mendorong SDGs yang berperspektif gender, inklusif dan transformative.

Diawali dengan melakukan Pertemuan Tim Koordinasi Daerah Pelaksanaan TPB/SDGs Kab. Lampung Timur pada tanggal 5 Juli 2018 bekerjsama dengan Bappeda Lampung Timur untuk mempertajam pemahaman TPB/SDGs khusus Pilar Pembangunan Sosial yang fokus penguatan perempuan dan pemenuhan HKSR Perempuan.

Kemudian tanggal 11-12 Juli 2018, Damar bekerjasama dengan Bappeda Kab. Lampung Timur menyelenggarakan Konsultasi Daerah Multi Pemangku Kepentingan Mewujudkan SDGs Responsif Gender Dan Transformatif yang melibatkan pemangku kepentingan teruatama kelompok perempuan, disabilitas dan kelompok marjinal. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan Deklarasi Multi Pihak dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Responsif Gender, Inklusif dan Transformatif. Dari Konsultasi Publik tersebut, Tim Koordinasi Daerah menyepakati pentingnya mengintegrasikan issu gender dalam penyusunan RAD TPB. Selain itu dari pertemuan tersebut diperoleh 13 rekomendasi untuk diajukan kepada Bappeda agar memastikan usulan program dan anggarannya dapat diakomodir ke dalam Perubahan APBD Tahun 2018.

LAPORAN KEUANGAN PROGRAM PERMAMPU

Untuk tahun 2018, penerimaan dana Permampu tahun 2018 sebesar Rp 7.625.285.269,- yang terdiri dari dana program 6.795.981.294,- dan Management Overhead (MO) Januari - September 2018 sebesar Rp 829.304.275.

Serapan dana program Permampu tahun 2018 secara keseluruhan mencapai 94,24 %; dimana serapan dana tertinggi adalah oleh lembaga DAMAR Lampung mencapai 100%, sedangkan yang terendah adalah WCC Palembang 82,82%. Detail dari serapan setiap anggota dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. Serapan Anggaran Tahun 2018 Berdasarkan Lembaga Anggota

Lembaga	Budget	Realisasi	Sisa	Serapan (%)
Flower	630.420.040	569.565.149	60.854.891	90,35
Pesada	869.164.000	857.403.341	11.760.659	98,65
PPSW	555.055.000	548.042.600	7.012.400	98,74
LP2M	504.905.000	493.344.847	11.560.153	97,71
APM	532.025.996	456.242.662	75.783.334	85,76
CP WCC	595.574.700	583.219.045	12.355.655	97,93
WCC Palembang	437.830.000	362.626.650	75.203.350	82,82
DAMAR	537.735.000	541.163.983	(3.428.983)	100,64
Host	2.049.990.000	1.914.640.833	135.349.167	93,40
Total	**6.712.699.736**	**6.326.249.110**	**386.450.626**	**94,24**

Alokasi anggaran PERMAMPU Tahun 2018 berdasarkan besaran dana per EOPO terdiri dari EOPO 1 (48 %), EOPO 2 (13%), EOPO 3 (11 %) dan EOPO 4 (28%). Berikut ini detail serapan anggaran Permampu berdasarkan EOPO:

Tabel 3. Serapan Anggaran Permampu Berdasarkan EOPO

EOPO	PROGRAM	BUDGET	REALISASI	%
EOPO 1	Perempuan pedesaan, perempuan miskin kota, dan perempuan muda (12-20 th) mempunyai kekuatan kolektif dan kekuatan ekonomi untuk pemenuhan HKSR	2.277.430.000	2.197.347.372	96
EOPO 2	Lembaga penyedia layanan menyediakan layanan HKSR yang mudah diakses, tepat dan bermutu	596.329.700	546.933.406	92
EOPO 3	Institusi keluarga, adat, dan agama melakukan perubahan praktik adat dan keagamaan yang berpihak terhadap HKSR.	542.375.000	460.814.743	85
EOPO 4	Pemerintah desa dan kab/kota memiliki pengetahuan dan political will dalam menyusun kebijakan terkait HKSR.	1.310.682.540	1.135.856.514	87
	JUMLAH	**4.726.817.240**	**4.340.952.035**	**92**

Jika dilihat dari serapan dana per EOPO, serapan dana tertinggi adalah EOPO 1, hal ini karena banyak kegiatan yang dilakukan masih dalam kontrol dari lembaga anggota sedangkan implementasi kegiatan yang berhubungan dengan pihak luar masih belum maksimal, misalnya di EOPO 3 khususnya dengan kegiatan yang berhubungan dengan tokoh adat dan tokoh agama yang hanya sebesar 85 %.

Mengingat tahun 2019 adalah tahun terakhir dari program MAMPU, diharapkan alokasi anggaran tahun 2019 lebih ditujukan untuk meningkatkan suara dan pengaruh kepada berbagai pihak sehingga bisa meningkatkan akses perempuan terhadap layanan HKSR yang berkualitas.

KEGIATAN HOST PERMAMPU

1. Penulisan Pembelajaran Kepemimpinan Feminist

Pada tanggal 2-3 Agustus 2018 telah terlaksana Lokakarya dan FGD Penulisan pembelajaran Kepemimpinan bertempat di Siantar. Lokakarya diikuti oleh 43 orang (40 Pr & 3 Lk) dari 8 anggota Permampu dan 4 LSM mitra Permampu (Hapsari, LBH Apik Aceh, KPI Sumbar, KPI Bengkulu).

Pada acara lokakarya ini diperoleh kesediaan lembaga menjadi narasumber, dan masukan dari peserta tentang sejarah perkembangan LSM perempuan di Sumatera. Sementara itu, FGD sehari memperoleh infomasi awal mengenai dinamika suksesi, kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan di 4 lembaga anggota Permampu yan gmenjadi studi kasus. Tim Penulis juga telah melakukan wawancara pendalaman ke 4 lembaga tersebut yaitu: Flower Aceh di Banda Aceh (18-20 September 2018), Pesada di Sidikalang (3-4 September 2018), LP2M di Padang (26-28 September 2018) dan CP WCC Bengkulu (9-10 September 2018). Saat ini tim penulis sedang dalam proses penulisan yang ditargetkan akan selesai pada bulan Februari 2019.

2. PrimeL Tahun 2018.

Tahun 2018 adalah pelaksanaan PrimeL (Participatory Internal Monitoring Evaluation & Learning) yang kedua setelah uji coba alat audit internal yang sebelumnya bernama PIA (Participatory Internal Audit). Tujuan PrimeL adalah untuk memberikan analisis, penilaian, saran dan komentar yang objektif secara partisipatif mengenai keorganisasian, kegiatan operasional, alur program berjalan sesuai dengan arah yang diharapkan, mengambil langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan program, dan memperoleh pembelajaran bersama untuk secara berkelanjutan transparan dan akuntabel, meningkatkan rasa kepemilikan terhadap program, dan memperkuat hubungan dengan Permampu.

Sesuai dengan penambahan L (learning = pembelajaran) maka proses PrimeL sekaligus merupakan penemuan pembelajaran dan peningkatan kapasitas staff terhadap isi dan analisis program, issue kepemimpinan dan organisasi. Beberapa point ditambahkan ke dalam alat PrimeL untuk lebih memperoleh informasi yang mencakup keseluruhan aspek keorganisasian dan program.

PrimeL ini dilakukan selama 3 hari di 8 lembaga anggota PERMAMPU. Penilaian PrimeL difokuskan pada Program Advokasi Pemenuhan HKSR Perempuan Melalui Penguatan Kepemimpinan Perempuan Akar Rumput di Sumatera untuk periode 1 September 2017 – 30 Oktober 2018. Tim fasilitator kegiatan Primel terdiri dari unsur Pengurus, Koordinator dan Host Permampu.

Rekomendasi PrimeL untuk pengembangan keorganisasian dan keuangan di lembaga Anggota PERMAMPU antara lain:

a. Pemahaman ulang personil tentang visi, misi, dan nilai lembaga/pedoman perilaku agar seluruh personil lembaga memahami tujuan program dan mampu melakukan advokasi untuk pencapaian visi misi lembaga.

b. Membangun mekanisme perencanaan dan evaluasi yang melibatkan penerima manfaat dan stakeholder secara lebih luas, Perencanaan program harus disertai dengan perencanaan sumber daya

c. Pentingnya merencanakan dan memulai upaya keberlanjutan lembaga melalui kaderisasi lini kedua dan personil muda secara regular khususnya untuk pergantian Direktur secara teratur; serta peningkatan kapasitas kader kelompok/kader, maupun membangun sistem fundraising secara mandiri.

d. Mengupayakan keragaman etnis, kelompok minoritas dan menjangkau orang dengan disabilitas sebagai relawan/personil organisasi.

e. Mendidik ulang konsep inovasi Permampu dan memastikan:

- CU atau Koperasi sebagai gerakan penguatan ekonomi dan politik perempuan
- OSS & L dilaksanakan sesuai prinsip awal.
- Mendidik lebih banyak keluarga dampingan menjadi Keluarga Peduli HKSR
- Peningkatan pelibatan tokoh adat dan tokoh agama khususnya dalam memediasi kasus- kasus pelanggaran HKSR
- Menggiatkan pendidikan politik di kelompok dan Perempuan Potensial khususnya dalam Pemilu April 2019 sebagai bentuk organic dari 4Ps.
- Lebih banyak menjangkau calon Femokrat dan menguatkan Femokrat yang sudah aktif menjadi mitra dalam melaksanakan Advokasi Kebijakan Pemenuhan HKSR

f. Setiap anggota mendokumentasikan praktek baik yang terjadi di lembaga masing-masing sehingga bisa diperluas atau direplikasi pihak lain, khususnya mengingat tahun 2019 adalah tahun terakhir implementasi program Advokasi HKSR perempuan.

g. Anggota Permampu membangun system pengendalian internal untuk memastikan implementasi SOP Keuangan sesuai dengan yang diharapkan.

h. Audit eksternal konsolidasi dilakukan setiap tahun.

3. Pertemuan Tahunan FKPAR dan Permampu.

Pada tanggal 20-21 Desember 2018 bertempat di Gedung Pusdipra, Sidikalang, Sumatera Utara, telah terlaksana Pertemuan Tahunan FKPAR dan Permampu. Pertemuan Tahunan diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ibu (baca: Hari Pergerakan Perempuan) Tahun 2018. Acara ini bertujuan untuk merefleksikan capaian Program Advokasi HKSR Perempuan khususnya innovasi dan merayakan seluruh capaian dan komitmen di Hari Pergerakan Perempuan Akar Rumput. Peserta yang hadir

berjumlah 75 orang (71 pr, 4 lk) dari perwakilan FKPAR dari 8 propinsi dan perwakilan 8 lembaga anggota Permampu. Acara diawali dengan tukar pengalaman FKPAR dengan CUB dampingan PESADA, yang secara paralel manajemen 8 lembaga anggota melaksanakan rapat untuk mengevaluasi capaian utama dan inovasi Permampu seperti model OSS&L, 4Ps untuk Perempuan Potensial, Keluarga & Desa Peduli HKSR dan dilanjutkan dengan merumuskan penajaman strategi untuk capaian tahun 2019. Forum ini juga bersama mendiskusikan capaian Rencana Kerja FKPAR, serta mendiskusikan 7 Langkah Pemenangan Perempuan di Pemilu sebagai upaya membangun kekuatan bersama & solidaritas FKPAR 8 propinsi untuk pemenangan perempuan di Pemilu 2019.

Tabel 4. Penajaman Strategis Tahun 2019.

EOPO	PROGRAM
EOPO 1	- Peningkatan kapasitas pengurus CU (pengelolaan pembukuan). - Pembenahan management CU untuk penguatan ekonomi perempuan akar rumput.
EOPO 2	- Gerakan Sadar IVA 2019. - Peningkatan jumlah keluarga yang menerapkan 'pendidikan seks' dalam keluarga.
EOPO 3	- Penguatan suami peduli HKSR untuk menjadi role model dan kader laki-laki. - Pelibatan Tokoh Agama dan Tokoh Adat untuk mediator kasus KTP & KTA. - Keluarga peduli HKSR dan CU telah menggunakan buku pegangan Pendidikan Seks.
EOPO 4	- Pemenangan Calon Legislatif Perempuan. - Advokasi anggaran dana desa untuk pemenuhan HKSR perempuan. - Adanya kebijakan tentang larangan pernikahan usia anak.
Inovasi Permampu	- Membentuk, mengembangkan dan memperkuat Desa Peduli HKSR. - Pengenalan/sosialisasi implementasi OSS&L di masyarakat dan peningkatan kapasitas kader pengelola OSS&L (sesuai prinsip).
Pedoman Perilaku	- Pendidikan pedoman perilaku dan membangun SOP penegakan pedoman perilaku.
Keberlanjutan	- Adanya kemandirian kelompok CU (Pesada level 4). - Pengembangan unit usaha tenun warna alami (Pesada, LP2M) dan Rumah Sehat (Flower Aceh).
Kelembagaan	- Kaderisasi kepemimpinan perempuan di lembaga. - Mengadakan lokakarya pertanggungjawaban publik. - Wakil FKPAR/Provinsi hadir dalam RAT CUB Pesada.

Photo Kegiatan Host Permampu



Rapat Permampu Akhir Tahun



Advokasi SDGs/TPB



PrimeL Anggota Permampu di LP2M Padang



Lokakarya Penulisan Pembelajaran Kepemimpinan Feminist

FORUM KOMUNITAS PEREMPUAN AKAR RUMPUT (FKPAR)



FKPAR Aceh



Pada semester ini, FKPAR Aceh banyak terlibat dalam rangkaian advokasi seperti mendorong OSS&L di Puskesmas, menyuarakan masalah perempuan dalam proses penyusunan rencana aksi daerah TPB/SDGs, mendorong disahkannya Qanun KIBBLA di Kab. Aceh Utara serta terlibat dalam aksi kolektif menyuarakan HKSR Perempuan dalam Kampanye 16 HKTP Tahun 2018.

Terdapat 217 orang anggota FKPAR telah mendapatkan pelayanan HKSR dengan rincian 99 orang melakukan pemeriksaan papsmear, 7 orang melakukan tes IVA dan 111 orang melakukan konsultasi KB dan isu kesehatan reproduksi lainnya. Pada periode ini, terdapat 151 orang anggota dan pengurus FKPAR aktif dan menduduki posisi publik sebagai Kepala Desa, Aparatur Desa, Majelis Adat Aceh, Majelis Pemusyawaratan Ulama, Tuha Peut/legislative di tingkat desa, Penyelenggara Pemilu, pimpinan organisasi di desa, pengurus parpol, dll. Bahkan untuk Pemilihan Legislatif 2019, terdapat 3 orang anggota FKPAR Aceh yang maju menjadi Calon Legislatif.

Struktur FKPAR Aceh tahun 2018-2019 yaitu pengawas: Siti Hawa (Pekka-Abdya), Aswadana (Pekka-Bireven), Kasmoni (Pekka), Suriani (Pekka), Gusi Luliana (KPI) dan pengurus yaitu Cut Raihan (ketua), Afrina (wakil), Evariana (wakil), Nurraihan Sina (wakil), Rasyidah (sekretaris), Rubiah (wakil).

FKPAR Sumatera Utara



FKPAR Sumatera Utara aktif terlibat dalam Aksi Kolektif mengkampanyekan pemenuhan HKSR Perempuan dan isu perempuan lainnya seperti Peringatan Hari Pangan di Gunung Sitoli pada 31 Oktober 2018, Peringatan Hari Perempuan Pedesaan di Sidikalang, dan 16 Hari Aktivisme Anti Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2018. Secara khusus, rally kampanye HKTP Tahun 2018 dilakukan oleh FKPAR di Kab. Pakpak Bharat, Dairi, Langkat dan Humbang Hasundutan yang menyuarakan Gerak Bersama Menghapus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perempuan", dimana salah satu tuntutan yang disuarakan adalah mendesak pengesahan RUU Anti Kekerasan Seksual.

FKPAR melakukan advokasi ke Pemerintah Daerah agar memberikan perlindungan sosial bagi warga miskin khusus perempuan sebagai Penerima Bantuan Iuran JKN sebanyak 237 perempuan di 6 Kab di Sumatera Utara. FKPAR juga semakin terlibat dalam mengadvokasi penyedia layanan

kesehatan agar mampu menyediakan layanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan melalui keterlibatan 18 orang anggota FKPAR dalam Tim Pengelola OSS&L untuk menerima pengaduan terkait pelayanan HKSR Perempuan.

Dalam pemilihan legislative tahun 2019 terdapat 21 orang calon legislative (2 orang di Dapil Kab. Pakpak Bharat, 2 orang di Kab. Dairi, 2 orang di Kab. Humbahas, 2 orang di Kab. Langkat, 1 orang di Sumut dan 12 orang di Nias). FKPAR berkomitmen untuk memenangkan Caleg Perempuan dan ikut mengawasi Pemilu dengan mendaftar menjadi Pemantau Independen.

FKPAR Riau



Dalam rangka 16 HAKTP dan Hari Pergerakan Perempuan, FKPAR Riau melakukan kampanye di acara Car Free Day di Kota Pekanbaru melibatkan FMS, FPM, dan NGO lokal. Kegiatan ini untuk mengkampanyekan penolakan segala bentuk kekerasan yang dialami oleh kelompok marginal seperti perempuan, anak, dan disabilitas. Sementara itu di Kab. Rokan Hilir, dilakukan dengan kegiatan diskusi dan lomba *public speaking* tentang penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak-hak perempuan. Dalam pelatihan tersebut kader anggota FKPAR dilatih untuk meningkatkan keterampilan dalam mengkampanyekan isu-isu perempuan di forum-forum publik.

FKPAR Riau melakukan advokasi HKSR dengan berpartisipasi dalam Musrembang Desa dan beraudiensi ke Kepala Desa Sungai Sialang Hulu untuk mendorong peraturan desa mengenai perlindungan perempuan dan anak; mendorong percepatan SPM Kesehatan untuk HKSR ke Dinas Kesehatan PKU dan audiensi ke PLT Bupati Rakan Hilir untuk mendorong pelaksanaan OSS&L di Puskesmas.

Untuk mendorong keterwakilan perempuan, FKPAR melakukan pendidikan politik bagi anggota dan mendorong anggotanya menjadi penyelenggara pemilu di tingkat lapangan. Dalam Pemilu 2019 nanti terdapat 3 orang anggota FKPAR Riau yang maju menjadi Calon Legislatif yakni 2 orang di Dapil Kab. Rokan Hilir dan 1 orang di Dapil Pekan Baru.

FKPAR Sumatera Barat



Kepengurusan FKPAR tingkat Provinsi Sumatera Barat dan tingkat Kab/Kota sudah terbentuk dan memiliki AD/ART. Komunikasi pengurus untuk memastikan pelaksanan agenda

FKPAR dilakukan melalui tatap muka maupun melalui online (WA grup). RK FKPAR untuk membuat database anggota baru hanya FKPAR di Kota Padang yang selesai sedangkan Kab Padang Pariaman dan Kab. Tanah Datar masih dalam proses pengerjaan. Pengurus FKPAR Kota Padang melakukan pelatihan rutin yang diikuti oleh pengurus dan anggota kelompok dilakukan sebanyak 3 kali yang dihadiri 25 perempuan.

Upaya advokasi FKPAR ke Pemerintah Desa pun semakin berkembang dengan adanya dukungan APBDesa bagi pengembangan usaha tenun dan program HKSR di Desa serta mulai diinisiasinya Peraturan Nagari tentang Perlindungan Perempuan. FKPAR pun ikut terlibat mendukung P2TP2A Provinsi Sumatera Barat untuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

FKPAR Jambi



Pada periode ini, FKPAR Jambi telah melakukan Rapat Kerja membahas kelembagaan FKPAR, komunikasi pengurus FKPAR Propinsi Jambi dan memetakan Calon Legislatif Perempuan di masing – masing wilayah. Dalam pertemuan tersebut disepakati Kepengurusan FKPAR Jambi terdiri dari Pelaksana yakni Astina Pasaribu (Ketua), Ernawati dan Siti Zulaikha (Anggota), Kordinator Wilayah yaitu Eti Suwarti (Kab.Merangin), Hidayati (Kab. bungo), Turyanita (Kab. Soralangun). Adapun anggota FKPAR Jambi yang maju menjadi Caleg Perempuan Munjiyah (Perindo) dan Rajinem di Dapil Kab.Merangin), Hidayati, S.Sos (PDIP Dapil Kab. Bungo) dan Juhriyah (PKB Dapil Kab.Sarolangun).

Advokasi HKSR Perempuan ke Pemerintah Desa terus dilakukan oleh anggota FKPAR dengan berpartisipasi dalam Musrembang Desa dan melobby agar dialokasikan anggaran untuk program penberdayaan perempuan. Paling tidak sudah 16 Desa yang mengalolakasi APBD untuk Pemberdayaan Perempuan rata-rata Rp. 25 juta.

FKPAR Bengkulu



FKPAR Bengkulu bersama CP WCC Bengkulu melakukan Rembug Desa tentang Peran Pemerintah Desa dalam Pemenuhan HKSR. Dalam rembuk desa dibahas usulan FKPAR tentang Pemenuhan HKSR agar dimasukan ke dalam APBDesa. Kegiatan Rembuk Desa dilakukan di 8 desa pada bulan Agustus -s/d September 2018 dengan total peserta 167 (80 Pr. & 87 Lk). Selain itu juga disepakati usulan membuat Raperdes tentang

Desa Bersih dan Sehat Desa Sumber Urip, Kab. Rejang Lebong serta Ranperdes Perlindungan Lahan Pertanian dan Pangan Desa Talang Lahat. Usulan ini akan dikonsultasikan dengan Bagian Hukum Pemda Kabupaten Rejang Lebong.

Struktur kepengurusan FKPAR Provinsi Bengkulu periode tahun 2019-2020 terdiri dari Pengurus yakni Lilis Suryani (Padang Kuas), Mardiani (Sumber Urip) dan Rini (Pondok Besi). Untuk posisi Pelaksana adalah Suhartini (Sumber Urip), Ismadiya (Purbosari) dan Endang (Padang Serai). Dalam Pemilihan Legislatif 2019, terdapat 3 orang anggota FKPAR Bengkulu yang maju menjadi Calon Legislatif yaitu May Susi (Partai PKB No Urut 9 Dapil 2 DPRD Kota Bengkulu), Leni Maryanti (PPP No Urut 3 Dapil 4 DPRD Kabupaten Seluma), Mardiani (PPP No Urut 3 Dapil 2 DPRD Kabupaten Rejang Lebong).

FKPAR Sumatera Selatan



Dalam rangka 16 HKTP Tahun 2018, FKPAR bersama WCC Palembang melakukan serangkaian kegiatan di antaranya di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Kab. Muaraenim tanggal 9 Desember 2018 berupa anti kekerasan terhadap perempuan dan HKSR dilakukan dengan pembagian masker, Test IVA, pemeriksaan gula darah, kolesterol, tensi darah dan asam urat bekerjasama dengan Puskesmas Gelumbang, diskusi publik HKSR dan lomba baca puisi terkait isu perempuan. Sementara di Kota Palembang dilakukan aksi simpatik membagikan bunga & brosur/ leaflet mengenai informasi Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) di jalan- jalan protokol di Kota Palembang. Anggota FKPAR juga berpartisipasi dalam Dialog Publik "Gerak Bersama Melawan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Memenuhi Hak-hak Perempuan di Provinsi Sumatera Selatan" pada tanggal 4 Desember 2018 di Kota Palembang. Kampanye Stop KTP masih sangat penting dilakukan karena masih tingginya kasus yang ditangani oleh WCC Palembang mencapai 38 kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang terdiri dari 7 KDRT, 5 KDP, 13 Perkosaan, 12 Pelecehan Seks, dan 1 lainnya.

Pengurus FKPAR membantu melakukan pendataan dan pembuatan identitas hokum (KTP, Akte lahir, Akta nikah) bagi anggota kelompok dan masyarakat lainnya di sekitar kelompok dampingan. Saat ini, struktur kepengurusan FKPAR terdiri dari Pengawas: Susilawati dan Marleni, Pengurus adalah Sutarmi dan Rita Syarlasa dan Pelaksana yaitu Herlis dan Maryati.

FKPAR Lampung

FKPAR Lampung aktif melakukan aksi kolektif bersama LSM/NGO, organisasi mahasiswa, organisasi keagamaan, Puskesmas, aparat penegak hukum dan Kantor Urusan Agama Daerah melakukan kampanye dan penyuluhan tentang isu kesehatan reproduksi bagi Perempuan Muda dan pencegahan kekerasan anak usia dini. Keterlibatan FKPAR

FKPAR Lampung



Lampung dalam forum publik pun semakin berkembang diantaranya Kader Perempuan Timur dalam Forum Komunikasi Wilayah Puspa Provinsi Lampung dalam sinergi program 3 END, Musrenbangdes di tingkat Kabupaten, menjadi kader BPS mendata Sensus Ekonomi dan Susenas dan 2 orang kader fakta Tanggamus menjadi kader Sistem Layanan Rujukan Terpadu Perlindungan Sosial.

Advokasi yang dilakukan oleh FKPAR semakin diakui yang ditandai dengan adanya alokasi anggaran Rp 60.000.000 untuk P2TP2A tahun 2018 di Kab Lampung Timur, anggaran Rp 150.000.000 untuk Satgas Perlindugan Perempuan dan Anak Desa Purwodadi, pengadaan sarana belajar PAUD dan insentif guru yang dikelola oleh FKPAR Tanggamus, dan adanya 20 perempuan miskin kota memperoleh akses JKN PBI di Bandar Lampung. FKPAR Lampung juga secara serius mempersiapkan 14 orang kadernya yang masuk menjadi Caleg dalam Pemilu 2019.

7 Langkah Pemenangan Caleg & DPD Perempuan di Pemilu Tahun 2019

1. Memonitor dan pendampingan untuk agenda politik Caleg & DPD Perempuan.
2. Membuat kontrak politik dan kepastian dukungan kepada Caleg & DPD Perempuan.
3. Menciptakan arena untuk promosi Caleg & DPD Perempuan .
4. Melakukan pengawasan pemilu khususnya di daerah pemilihan Caleg & DPD Perempuan.
5. Mengatifkan media sosial untuk pemenangan Caleg & DPD Perempuan.
6. Membuat seruan publik untuk memilih Caleg & DPD Perempuan dan sikap politik terhadap pemilihan Presiden.
7. Membuat pernyataan sikap terhadap hasil Pemilu Legislative dan Presiden.



DAFTAR NAMA-NAMA CALEG PEREMPUAN PEMILU LEGISLATIF 2019
FKPAR SUMATERA - KONSORSIUM PERMAMPU

No	Nama Calon	Partai	Daerah Pemilihan	No urut	Kabupaten/Kota
Flower Aceh					
1	Rasyidah	Parta Aceh	DPRK Dapil 5	4	Banda Aceh
2	Mahyuni	Partai Aceh	DPRK Dapil 4	8	Aceh Utara
3	Tjut Ika Mauliza	Golkar	DPRK Dapil 5	6	Lhokseumawe
Pesada					
1	Rismawaty Bancin	Gerindra	DPRD Kab Dapil 2	3	Pakpak Bharat
2	Juni Maria Panggabean	Golkar	DPRD Kab Dapil 1	9	Pakpak Bharat
3	Elisabeth Lumbantobing	Gerindra	DPRD Kab Dapil 1	6	Dairi
4	Dunen Nainggolan	PDIP	DPRD Kab Dapil 1	9	Dairi
5	Elmi Suhariani	PBB	DPRD Kab Dapil 4	6	Langkat
6	Shoviana Sisca	PBB	DPRD Kab Dapil 1	9	Langkat
7	Rasmina Sitepu	Demokrat	DPRD Provinsi Sumut 2	6	Sumatera Utara
8	Nelly Sianturi	Golkar	DPRD Kab Dapil 1	2	Humbang Hasundutan
9	Sanggul Rosdiana Manalu	Hanura	DPRD Kab Dapil 1	3	Humbang Hasundutan
10	AgusmuliaTafonao	Garuda	DPRD Prov Sumut 8	3	DPRD Provinsi
11	Yarniwati Mendrofa	Gerindra	DPRD Kab Dapil 3	3	Nias Utara
12	RosniaTafonao	Perindo	DPRD Kab Dapil 4	3	Nias Selatan
13	Mesiwati Zega	Gerindra	DPRD Kab Dapil 3	3	Nias Barat
14	Lirana Hulu	PDIP	DPRD Kab Dapil 1	7	Nias Barat
15	Masih Adil Laowo	Golkar	DPRD Kab Dapil 3	3	Nias Utara
16	Nurmina Harefa	Perindo	DPRD Kab Dapil 1	6	Nias Utara
17	Yarni Zendrato	Golkar	DPRD Kab Dapil 1	9	Gunungsitoli
18	Putri Mesra Diana	Golkar	DPRD Kab Dapil 1	8	Gunungsitoli
19	OtilinaTelaumbanua	PDIP	DPRD Kab Dapil 2	3	Nias Utara
20	Seniman Armanwati Hulu	PAN	DPRD Kab Dapil 3	3	Nias Utara
21	Marietta Waruwu	Perindo	DPRD Kab Dapil 1	5	Nias Barat
PPSW Sumatera					
1	Nita Marlina	Nasdem	DPRD Kab Dapil 1	3	Rokan Hilir
2	Rohani	Nasdem	DPRD Kab Dapil 2	3	Rokan Hilir,
3	Yulia Emhanis	PPP	DPRD Kab Dapil 2	5	Pekanbaru

LP2M					
1	Afrida	PDIP	DPRD Provinsi Sumatera Barat 1	2	Padang
2	Gemala Purnama Putra	PKB	DPRD Kab Dapil 1	6	Padang Pariaman
APM Jambi					
1	Munjiyah	Perindo	DPRD Kab Dapil 2	2	Merangin
2	Rajinem	Nasdem	DPRD Kab Dapil 2	3	Merangin
3	Hidayati	PDIP	DPRD Kab Dapil 2	1	Bungo
4	Hj.Ranita	Perindo	DPRD Kab Dapil 1	3	Sarolangun - Bangko
5	Ria Mayang Sari	Perseorangan	DPD Kab Jambi	37	Jambi
CP WCC					
1	Kamsiatun	PKS	DPRD Kab Dapil 4	3	Seluma
2	Maisusi PKB	PKB	DPRD Kab Dapil 2	9	Bengkulu
3	Leni Maryanti	PPP	DPRD Kab Dapil 1	3	Seluma
4	Mardiani	PPP	DPRD Kab Dapil 2	3	Rajang Lebong
WCC Palembang					
1	Maphilinda Syahrial Oesman	Nasdem	DPR RI	1	Sumsel
2	Telly P Ulviana Siwi Zaidan	Golkar	DPR RI	8	Sumsel
3	Herlis Noorida	PKB	DPRD Kab Banyuasin	6	Banyuasin
Damar Lampung					
1	Siti Noor Laila	PDIP	DPR Lampung 1	3	Bandar Lampung
2	Epy Zailina	PDIP	DPRD Provinsi	9	Tanggamus
3	Hanifah	PDIP	DPRD Kab Dapil 4	6	Tanggamus
4	Lisa	PKB	DPRD Kab Dapil 3	2	Tanggamus
5	Rodiah	PDIP	DPRD Kab Dapil 3	2	Tanggamus
6	Anita	PDIP	DPRD Kab Dapil 3	6	Tanggamus
7	Indah Lestari	PAN	DPRD Kab Dapil 1	5	Lampung Timur
8	Siti Komariyah	PPP	DPRD Kab Dapil 6	1	Lampung Timur
9	Anggraini	PDIP	DPRD Kab Dapil 1	5	Lampung Utara
10	Ovi Maeni	Nasdem	DPRD Kab Dapil 4	3	Lampung Utara
11	Marwiyah	PKB	DPRD Kab Dapil 1	3	Lampung Utara
12	Danti	PDIP	DPRD Kab Dapil 2	3	Lampung Utara

Keterangan:

1. Total 53 orang dengan rincian per Lembaga: 3 Flower Aceh, 21 Pesada, 3 PPSW, 2 LP2M, 5 APM, 4 CP WCC, 3 WCC Palembang dan 12 Damar.
2. Komposisi arena: 45 DPRD Kab, 4 DPRD Prov, 3 DPR RI, 1 DPD: 1

FORUM MULTI STAKEHOLDER (FMS)



FMS Aceh



FMS Kab. Aceh Utara bersama Flower Aceh pada semester ini terlibat intensif dalam proses mendorong Pemerintah Kab. Aceh Utara dan DPRD untuk pengesahan rancangan qanun KIBBLA. Upaya tersebut berhasil setelah pada tanggal 28 Desember 2018 Qanun KIBBLA ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRK Aceh Utara. Qanun KIBBLA diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan dan menghapus Angka Kematian Ibu, Balita, dan Bayi Baru Lahir di Aceh Utara, serta meningkatkan anggaran pemberdayaan perempuan yang harus menyentuh kelompok perempuan di desa.

Di Banda Aceh, FMS melakukan Dialog Publik membahas implementasi SPM Kesehatan di Banda Aceh. Dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa kendala implementasi SPM Kesehatan antara lain minimnya alokasi dana, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan, minim jumlah tenaga medis baik dari segi kualitas dan kuantitas (distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata), angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih tinggi. Dalam pertemuan tersebut juga ditujukan untuk memperkuat komitmen lintas sektoral untuk memaksimalkan fungsi FMS dalam koordinasi dan advokasi Pemenuhan HKSR di Banda Aceh.

FMS Kab. Pidie terlibat mengawal penyusunan RAD TPB/SDGs secara khusus fokus pada Pilar Pembangunan Sosial. Dalam audiensi ke Wakil Bupati Pidie, Pemkab berjanji meningkatkan anggaran perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan mengoptimalkan dana desa untuk pemberdayaan perempuan bukan untuk pembangunan fisik semata. Pemda Pidie juga berkomitmen melakukan percepatan pelaksanaan RAD SDGs dengan meminta asistensi kepada Flower-Permampu untuk asistensi penyusunan RAD SDGs Pidie yang responsif gender, inklusif dan transformatif.

FMS Sumatera Utara



Diskusi regular FMS semester ini mendiskusikan pemahaman TPB/SDGs dan kaitannya dengan pemenuhan HKSR Perempuan, mendalami konsep OSS&L dan mengkritisi PP No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, serta mendiskusikan penggunaan buku promosi kesehatan bagi kader penerima keluhan. Diskusi regular FMS tersebut juga melibatkan Keluarga HKSR.

Pertemuan FMS Sumatera Utara dilaksanakan tanggal 11-12 Oktober 2018 yang dihadiri oleh 26 orang (18 Pr & 8 Lk.). Dalam pertemuan ini peserta membahas mengenai

capaian dan tantangan yang dihadapi FMS pada tahun 2018 dan menyusun Rencana Kerja Tahun 2019 yang mengintegrasikan TPB/SDGs. Capaian FMS misalnya aktif menjadi fasilitator, terlibat audiensi ke pemerintah (MoU utk layanan OSS&L), narasumber KPG Suami, penyederhanaan aturan adat perkawinan di Nias Barat. Tantangan yang masih dihadapi FMS misalnya anggota belum aktif, sulit alokasikan waktu, dan masih minim tokoh agama menjadi anggota FMS. Fokus RK FMS pada tahun 2019 antara lain advokasi dana desa untuk bantuan warga miskin, mencetak brosur ttg layanan OSS&L, diskusi HKSR di sekolah, dan lain-lain.

FMS Riau



Pertemuan FMS Tingkat Provinsi Riau dilaksanakan pada tanggal 10-11 Desember 2018 yang dihadiri oleh anggota FMS Kota Pekanbaru dan Kab. Rokan Hilir bertempat di Hotel Grand Zury, Pekanbaru. Dalam pertemuan diisi dengan diskusi dengan narasumber dari Dinas Kesehatan dan Dinas Organisasi Tata Laksana Provinsi Riau. Pertemuan FMS Provinsi dihadiri oleh 24 orang (20 Pr. & 4 Lk.)

Output dari pertemuan ini adalah adanya restrukturisasi pengurus FMS Tingkat Provinsi Riau, tersusun rencana kerja FMS 3 bulan ke depan yaitu penyusunan dan pengurusan SK, audiensi ke Dinkes Provinsi Riau, dan rapat pengurus untuk menyusun rencana kerja. Salah satu tantangan FMS adalah masih belum aktifnya anggota FMS memberi waktunya. Oleh karena itu perlu upaya pendekatan kepada anggota FMS agar optimal berperan dalam pemenuhan HKSR Perempuan.

FMS Sumatera Barat



Diskusi regular FMS di Kota Padang dilakukan pada 19 September 2018 yang diikuti oleh 32 orang peserta (24 Pr & 8 Lk) yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Bappeda, DP3AP2KB, Dinas Pendidikan, Puskesmas, Camat, Tokoh adat, Tokoh Agama, AIMI, PKBI, RUANDU dan FKPAR. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang kondisi kesehatan seksual reproduksi dan gizi perempuan di Sumatera Barat dan merumuskan upaya bersama untuk perbaikan kondisi HKSR dan gizi Perempuan. Diskusi diawali dengan presentasi Otriramayani Dwiputri tentang penelitian gizi yang telah dilakukan LP2M pada tahun 2017. Setelah itu, paparan narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat yang menggambarkan masalah kesehatan perempuan di Sumatera Barat antara lain kehamilan dibawah umur, remaja putri yang

kekurangan kalori, risiko ibu yang kekurangan kalori, kematian bayi karena gizi ibu hamil kurang dan jarak kehamilan rapat, remaja yang anemia, serta anak yang tidak mendapatkan ASI eksklusif. Dalam pertemuan ini disepakati untuk melakukan pendidikan HKSR dan Gizi kepada remaja baik di sekolah maupun di kelurahan serta mendorong adanya MoU antara Puskesmas, pihak sekolah, Camat dan LP2M.

Pertemuan FMS Kota Padang terlaksana pada 14 Desember 2018 di Hotel Rangkayo Basa-Padang dalam rangka Peringatan HAKTP. Kegiatan ini dihadiri oleh 105 orang FMS (77 Pr dan 28 Lk) dari 3 kab./kota yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Bappeda, DP3AP2KB/DPPPA, Dinas Pendidikan, Puskesmas, Camat, Tokoh adat, Tokoh agama, LSM dan FKPAR. Kegiatan membahas tingginya angka pernikahan usia anak (<20 tahun) di Sumatera Barat, dimana terdapat 6.083 pasangan (rentang 2010 s/d 2015) menikah pada usia anak serta tingginya angka kekerasan. Pertemuan ini menghasilkan komitmen bersama dalam mengakhiri pernikahan usia anak di Sumatera Barat dengan mendorong adanya kebijakan daerah dan nagari, bekerja sinergis lintas sektor pemerintah dan pelibatan masyarakat, pengembangan adat budaya untuk pencegahan, perlindungan anak, pendidikan kesehatan tubuh dan mengakhiri segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

FMS Jambi

Diskusi reguler FMS Kab. Merangin dilakukan pada tanggal 24 Juli 2018 bertempat di Aula Kantor BPKAD Kab. Merangin. Diskusi FMS ini dihadiri oleh 15 orang peserta (10 Pr. &



5 Lk.) yang membahas issu perempuan dan anak di Kabupaten Merangin, seperti perkawinan usia anak, kekerasan terhadap perempuan, infeksi menular seksual dan partisipasi laki-laki dalam KB, masalah penganggauran, peran tokoh adat dalam issu kekerasan terhadap perempuan dan HKSR. Berangkat dari masalah tersebut disusunlah RK FMS tahun 2019 ini akan fokus mendorong diterbitkannya Peraturan Bupati terkait pencegahan perkawinan usia anak, mengadvokasi dana desa untuk pemberdayaan perempuan dan mendorong Bupati agar memfasilitasi peluncuran penggunaan buku saku pernikahan bagi petugas KUA.

FMS Bengkulu



Pada tanggal 25 Agustus 2018, FMS Kab. Rejang Lebong menyelenggarakan Dialog Publik Peran Pemerintah Desa dalam Pemenuhan Kesehatan Reproduksi dan Gizi

Perempuan di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong. Diskusi ini dihadiri oleh 55 (33 Pr & 22 Lk) yang membahas langkah mendapatkan bantuan hukum bagi korban dari masyarakat miskin, pendataan bantuan sosial agar tepat sasaran, cara memperoleh JKN gratis bagi warga miskin serta mengoptimalkan sinergi Organisasi Perangkat Daerah lain selain Dinas Kesehatan dalam menurunkan kasus gizi. Sementara di Kab. Seluma, Dialog Publik Peran Pemerintah Desa dalam Pemenuhan Kespro dan Gizi Perempuan dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2018 di Aula Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma. Kegiatan ini diikuti oleh 59 orang (30 Pr & 29 Lk) dan menyepakati bahwa anggota FMS akan mengadvokasi anggaran perbaikan gizi dan pelayanan KIA di Desa.

Di Kab Seluma, FMS melakukan lobby/audiensi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma pada tanggal 26 November 2018 yang diikuti 9 orang anggota FMS. Dalam audiensi ini dibahas tentang isi RAD Pencegahan Perkawinan Anak di kab. Seluma dan Surat Edaran Bupati Seluma nomor 180/142/SE/B2/DP3APP&KB/2018. Pada kesempatan hari itu juga FMS melakukan audiensi ke DPRD Kab. Seluma untuk membahas usulan anggaran pembiayaan kegiatan RAD tersebut. Sementara di Kabupaten Rejang Lebong, FMS melakukan audiensi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong kegiatan pada tanggal 12 Desember 2018. Audiensi ini diikuti oleh 10 orang peserta (4 Pr. & 6 Lk.) Audiensi tersebut membahas Rencana Aksi Daerah (RAD) dan Perbup untuk perbaikan gizi di Rejang Lebong.

FMS Sumatera Selatan



WCC Palembang memfasilitasi Lokakarya Pembentukan Forum Multistakeholder (FMS) Kota Palembang yang diikuti oleh 30 orang (24 Pr & 6 Lk) bertempat di Ruang Rapat Dinas PPPA & PM Kota Palembang. Pertemuan ini menyepekati untuk membentuk Anggota FMS Kota Palembang yang terdiri dari orang-orang kunci di OPD dan kelompok perempuan serta tokoh masyarakat yang memiliki komitmen memperjuangkan kebijakan Pemenuhan HKSR dan Gizi Perempuan. Rencananya akan diupayakan adanya SK Pembentukan FMS sebagai legalitas. Pertemuan FMS ini dilanjutkan dengan diskusi penyadaran gender dan HKSR Perempuan khususnya mendiskusikan hasil penelitian Permasalahan Gizi perempuan dan Perempuan Muda. Dari pertemuan ini, anggota FMS memperoleh pemahaman tentang gender, masalah HKSR Perempuan serta struktur tugas dan rencana kerja FMS ke depan.

FMS Lampung

Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR menggelar Lokalatih Legal Drafting Tentang HKSR Dan Gizi Perempuan Bagi Anggota Forum Pemangku Kepentingan Asal Lima Kabupaten Kota di Lampung, di Hotel



Emersia, Bandar Lampung, 28-30 Desember 2018. Kegiatan tersebut difasilitasi oleh Tim Akademisi Fakultas Hukum (FH) Universitas Lampung (Unila) Dr. H.S Tisnanta, S.H., M.Hum dan Ahmad Fathoni, S.H., M.H, serta menghadirkan beberapa narasumber dari Biro Hukum Setda Propinsi Lampung, pemaparan mengenai Mekanisme/Prosedur Pembuatan Kebijakan Daerah, Drs. Ikram, M. Si, pemaparan mengenai persoalan Gizi Perempuan di Lampung, dan Sely Fitriani, Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR, pemaparan mengenai Persoalan Kesehatan Seksual Reproduksi di Lampung, serta melibatkan 25 peserta (22 Pr & 3 Lk) yang terdiri dari perwakilan Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Institusi Keagamaan Islam, Aparatur Pemerintahan Desa dan Serikat Perempuan dari Bandar Lampung, Lampung selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Tanggamus. Damar Lampung mengharapkan agar pemerintah daerah lintas sektor semakin memahami persoalan HKSR dan pemenuhan gizi, memahami penyusunan peraturan hukum, serta prinsip-prinsipnya, serta meningkatnya keterampilan peserta dalam menyusun kebijakan, seputar HKSR dan pemenuhan gizi perempuan.

16 HARI AKTIVISME
PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN









Cerita Perubahan



Credit : Women empowerment symbol - internet

"Meski Hanya Tukang Cuci, Aku Punya Tabungan Untuk Kesehatan & Masa Depan.."

Ditulis oleh: Husni Hafdiana, Staf Flower Aceh



Tahun 2005 setelah tsunami, Flower Aceh datang ke Desa Alue Deah Tengoh, kecamatan Meuraxa Banda Aceh, dan melakukan pertemuan di gampong. Saya diajak teman untuk hadir ke pertemuan itu untuk mendengarkan diskusi tentang kesehatan, cara membuat sabun cuci, dan banyak pengetahuan yang disampaikan oleh staf FLower Aceh; meski sekali-kali ada bolong juga karena berhalangan ada pekerjaan mencuci dan lainnya, kadang juga karena sakit. Tapi saya tertarik karena ada simpan pinjam (CU) dan saya suka untuk menabung dari hasil cucian yang saya dapatkan.

Umurku 61 tahun dan perempuan kepala keluarga karena suami menceraikan saya dan menikah lagi. Selama satu tahun terkahir ini saya terlibat dalam program Flower Aceh yang didukung Mampu, dan saya rasakan perubahan yang berarti. Awalnya saya tidak begitu peduli dengan apa yang didiskusikan di kelompok, karena menurut saya yang penting datang, tanda tangan; dan setelah mendapatkan konsumsi langsung pulang. Namun lama kelamaan dengan ilmu pengetahuan yang disampaikan tentang kesehatan, saya merasa ini penting untuk saya dengar. Juga setelah menabung saya merasa ada perubahan, saya bisa menyimpan uang dari hasil cucian dan hasil jualan ternak bebek dan telur ayam. Saya menyimpan uang untuk ditabung sama bendahara dan uang ini bisa untuk saya pakai berobat pada saat sakit, untuk bekal di bulan puasa, dan menjelang lebaran saya bisa mengambil uang tabungan untuk membeli baju baru untuk anak dan cucu saya.

Saat ini saya semakin mengerti kesehatan tubuh. Dulu tidak tau cara mandi yang benar dan bersih, dan tidak tau cara merawat diri seperti cara cebok yang benar. Setelah mendapat ilmu dari Flower Aceh sudah tau cara mencuci tangan dan menggantikan pakaian dalam paling kurang dua kali sehari. Kalau dulu merasa tidak mengerti apa itu kesehatan dan cara menjaganya yang benar, harus sakit parah dulu baru ke rumah sakit untuk berobat; namun sekarang kita tau bahwa sangat penting menjaga tubuh agar tetap sehat dan mengerti apa yang harus harus dilakukan. Saya juga bisa membuat jamu olahan sendiri untuk diminum dan bisa juga diberikan untuk anak dan cucu saya.

Yang tak kalah penting juga saya bisa menyisihkan uang gaji yang saya dapatkan dari hasil saya mencuci pakaian dirumah-rumah orang. Kalau dulu tidak ada tabungan, tidak ingat untuk menyimpan uang, karena kadang begitu saya dapat uang langsung ke pasar belanja semua kebutuhan dan uangnya habis; tetapi sekarang saya tidak khawatir karena ada tabungan yang saya sisihkan di CU. Menjadi anggota CU berarti saya sudah mempersiapkan bekal untuk masa tua saya, pada saat sakit dan pada saat menjelang lebaran.

Saya memperoleh manfaat sangat banyak dari pendampingan selama ini. Menabung di CU juga mempersiapkan dana untuk saya sendiri yang bisa digunakan sewaktu-waktu di saat saya tidak lagi sanggup mencuci pakian dirumah orang, dan bisa saya ambil pinjaman disaat saya butuhkan dalam keadaan mendesak.

"Dulu Ikut Ibu, Sekarang Memimpin Forum Perempuan Muda"

Ditulis oleh: Ganda Siregar, Staf Pesada



Nama saya adalah Riska Ananda, lahir tanggal 8 September 1998; jadi sudah berumur 20 tahun. Saya tinggal di Jln. Kartini Lingkungan V Asrama Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat , sekitar 2 jam dari Medan. Saya dari kecil sudah tinggal di Stabat bersama orangtua saya. Langkat yang identik dengan suku Melayu, meskipun demikian, bahasa sehari-hari yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Hal ini karena di desa tempat saya tinggal beragam suku yang tinggal selain suku asli Melayu.

Kabupaten Langkat adalah salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara yang terkenal kebersihannya dan ini dibuktikan dengan penghargaan ADIPURA yang diberikan untuk Kab. Langkat dari pemerintah Indonesia. Setiap tahun Kabupaten Langkat merayakan hari jadinya dengan melaksanakan acara untuk mengasah bakat anak-anak seperti: fashion show busana daerah, tarian daerah sampai penampilan dari beragam suku. Namun tak bisa dipungkiri, banyak persoalan yang belum dapat diselesaikan oleh pemerintah Kab.Langkat, seperti masih tinggi Angka Kematian Ibu (AKI), pelecehan seksual kepada anak-anak, pernikahan dini dan terakhir bahwa Kabupaten Langkat tinggi angka stunting.

Saya ikut Pesada mulai tahun 2016. Saat itu saya masih duduk di perguruan tinggi STKIP Budidaya Binjai, Awalnya saya diajak ibu ikut dalam acara pertemuan perempuan muda di Sidikalang-Dairi. Dari sanalah saya semakin mengenal PESADA, dan saat itu juga saya mendapat banyak pengetahuan mengenai Hak Kesehatan Seksual & Reproduksi Perempuan dan teman perempuan muda dari berbagai daerah seperti Nias, Sibolga, Humbang Hasundutan, dll.

Setelah itu saya diundang kembali mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di Dewi Garden Sibolangit, hingga akhirnya rutin mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Pesada. Dari berbagai kegiatan yang saya ikuti, di hati kecil saya terbersit keinginan untuk membentuk kelompok perempuan, yang sering disebut Forum Perempuan Muda; agar semakin banyak perempuan muda yang mendapatkan informasi mengenai Kesehatan Seksual dan Reproduksi seperti yang saya dapatkan di PESADA. Keinginan ini akhirnya terwujud, dimana pada tanggal 24 Agustus 2018, Pesada melakukan pertemuan untuk Perempuan Muda Kabupaten Langkat untuk pertama kalinya. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan Perempuan Muda Se-kabupaten Langkat yang terdiri dari perwakilan siswa SMA, remaja masjid, remaja desa. Dalam pertemuan ini, peserta memperoleh informasi mengenai PESADA dan kegiatan yang dilakukan untuk perempuan dan perempuan muda. Selain itu juga peserta memperoleh informasi mengenai Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi. Dalam kegiatan tersebut dilakukan pemilihan kepengurusan Forum Perempuan Muda Langkat. Saat itu seluruh peserta sepakat memilih saya menjadi Ketua Perempuan Muda Se-kabupaten Langkat. Kami menamainya Forum Gerakan Perempuan Muda Langkat (GPML).

Harapan saya, dengan adanya GPML ini, akan semakin banyak perempuan muda di Kabupaten

Langkat mendapatkan informasi mengenai hak-hak perempuan dan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Perempuan. Selain itu juga melalui wadah ini perempuan mengetahui dan menghargai serta mampu menjaga tubuhnya agar terbebas dari segala bentuk kekerasan. Saat ini kami masih dalam proses untuk menjalankan program-program yang akan kami jalankan dalam komunitas GPML.

"Jangan Makan Makanan Instan... " HKSR Mengantarkanku Pada Kehidupan Yang Lebih Baik

Ditulis oleh : Misdayani, Staf PPSW Sumatera



Nama saya Rika Yani. Saya berumur 25 tahun. Saya tinggal di jl. Penghulu Layan RT 013 RW 005 Dusun Sidojaya Kepenghuluan Lenggadai Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

Pada tahun 2005 saya bergabung di kelompok Anugerah, salah satu unit pada Koperasi Wanita Bunga Bangsa (WBB). Saat itu, saya baru pindah ke Dusun Sidojaya. Saat bergaul dengan anggota koperasi, saya pun selalu mendengar banyak hal yang positif tentang kelompok dan koperasi, sehingga akhirnya saya tertarik mengikuti kelompok tersebut dengan tujuan untuk menjalin silaturahmi dengan anggota kelompok dan saya ingin belajar di kelompok.

Setelah saya masuk kelompok, saya mengikuti Program HKSR. Kelompok saya adalah salah satu unit Koperasi Wanita Bunga Bangsa (WBB) dimana koperasi WBB sangat aktif dalam memberdayakan perempuan dan sangat peduli dengan kesehatan perempuan. Jujur sebelumnya saya adalah orang yang buta akan HKSR. Tapi sekarang Alhamdulillah saya sudah mengerti HKSR walaupun masih sedikit-sedikit. Bahkan saya sudah mengkampanyekan pentingnya HKSR bagi perempuan melalui kelompok, perwiridan (Pengajian), tetangga dan terutama dalam keluarga saya. Saya memang sudah terbiasa bersosialisasi dengan masyarakat yang beraneka ras, suku, dan agama karena sebelumnya pekerjaan saya adalah KAUR Desa (Kepala urusan – salah satu perangkat Desa). Dalam perkerjaan saya tersebut saya bisa dikategorikan sangat menguasai wilayah kerja termasuk hubungan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, saya sangat mudah untuk mensosialisasikan HKSR ke masyarakat khususnya perempuan dan perempuan muda di desa saya.

Setelah mengikuti program HKSR yang difasilitasi oleh PPSW Sumatera yang bekerjasama dengan Konsorsium Permampu dan Program MAMPU ini, memang sangat banyak perubahan yang saya alami terutama untuk diri saya sendiri. Sekarang saya dan suami pun memprioritaskan kesehatan organ reproduksi saya dengan selalu mengecek kesehatan saya setiap 3 bulan sekali, walaupun saya tidak sakit. Saya menjadi perempuan yang sadar akan kebutuhan saya sendiri. Saya lebih mencintai diri saya. Saya bisa menerapkan pola hidup sehat dalam keluarga dan lingkungan. Saya mulai memperkenalkan pada putra saya yang masih TK nama-nama organ reproduksinya tanpa memakai bahasa local misalnya 'burung" menjadi "penis". Kemudian memberi informasi HKSR kepada anak-anak tetangga saya yang remaja tentang efek kenakalan

remaja, pergaulan bebas, KTD, merokok, HIV/AIDS, dan dampak dari nikah muda. Dan masih banyak perubahan lain yang saya rasakan sangat bermanfaat. Saya menyadari bahwa perubahan itu sangat penting dalam kehidupan saya.

Perubahan pada diri saya sendiri pertama sekali terjadi ketika saya mengikuti test Papsmear di koperasi WBB dalam rangka Hari Peduli HKSR. Pada saat diperiksa, dokter mengatakan bahwa di organ reproduksi saya terdapat benjolan kecil. Memang tidak berbahaya tetapi kalau dibiarkan terlalu lama maka benjolan tersebut akan semakin besar dan akan menimbulkan rasa sakit. Kemudian saya sampaikan kepada suami apa-apa yang dikatakan dokter. Suami saya pun menjadi khawatir sehingga memutuskan untuk menemui dokter tersebut. Kata dokter, benjolan tersebut tidak apa-apa. Saya dianjurkan tidak boleh mengkonsumsi makanan instan selama 1 bulan. Sejak saat itu saya menyadari bahwa kesehatan saya, sayalah yang harus menjaganya dan suami saya sangat mendukung untuk bersama-sama menjaga kesehatan reproduksi. Semua pengetahuan HKSR yang diberikan PPSW sangat bermanfaat dan membuat saya semakin yakin bahwa saya dan semua perempuan perlu mengetahui informasi HKSR untuk selalu menjaga kesehatan reproduksi.

Saya menyakini bahwa perubahan ini bermanfaat untuk kehidupan saya, keluarga, dan lingkungan serta pada masa yang akan datang untuk anak-anak. Ketika kita sudah mengetahui manfaat HKSR dari sekarang dan kita menerapkan pola hidup sehat dalam keluarga dan menanamkan cara asuh dan pola pikir hidup sehat sejak dini kepada anak-anak dan generasi penerus kita, maka bisa dipastikan kesehatan kita akan semakin baik di masa yang akan datang.

"Nenek CO Mengajar Silek Ke Perempuan Muda" Agar Berbudaya Dan Sanggup Melawan Pelecehan

Ditulis oleh : Wira Fajriani, Staf LP2M



Nama lengkapnya Yuswaningsih. Namun masyarakat di Jorong Melur (setingkat RW) sering memanggilnya "Imah". Imah adalah salah seorang CO yang didampingi LP2M sejak tahun 2016. Imah merasa sangat beruntung bisa menjadi CO Nagari Lubuk Jantan, salah satu nagari dampingan LP2M di Kabupaten Tanah Datar. Tidak hanya mendampingi Kelompok Perempuan Usaha Kecil, LP2M juga mendampingi kelompok perempuan muda di tempat tinggalnya Jorong Melur Nagari Lubuk Jantan ini. Menurut Imah, Kegiatan Penguatan Kelompok Perempuan Muda (KPM) adalah satu satu kegiatan yang sangat positif bagi anak muda khususnya perempuan muda, sehingga Imah pun aktif membantu untuk mengumpulkan dan mengajak perempuan muda di Jorong melur untuk rutin mengikuti kegiatan KPM.

Imah adalah seorang ibu sekaligus nenek berusia 58 tahun yang sehari-hari berjualan makanan untuk anak-anak di depan rumah. Selain itu, Imah bersama seorang temannya aktif mengajarkan kesenian Minangkabau kepada anak muda Jorong Melur seperti kegiatan Randai, Silek(Silat) dan bermain alat musik

tradisional. Melalui kesenian Minangkabau, Imah mengajak anak muda untuk sehat dan berbudaya. Sejak LP2M mendampingi nagarinya, perempuan muda Jorong Melur bersemangat untuk mengajak anak muda lainnya ikut Kegiatan Pertemuan Rutin bulanan Program Advokasi HKSR dan Gizi. Menurut Imah, anak muda harus sehat dan peduli terutama perempuan muda, karena masa remaja adalah masa yang paling berpengaruh pada kehidupannya di masa mendatang. Jika anak muda bisa mengisi masa remajanya dengan hal-hal yang positif maka mereka tidak akan lagi berpikir untuk menikah di usia anak/dini dan terhindar dari pergaulan bebas sehingga akan memiliki masa depan yang baik. Melalui kegiatan dari LP2M mereka sadar akan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi, menjaga dirinya dari pelecehan, dan juga bisa mengajarkan kepada teman sebayanya. Bahkan melatih keberanian perempuan muda berbicara di depan umum. Imah mengetahui kondisi tersebut karena selalu terlibat aktif dalam kegiatan yang dilakukan perempuan muda Jorong Melur.

Untuk menjaga diri dari segala bentuk pelecehan, perempuan muda juga harus kuat. Oleh karena itu, Imah dan teman perempuannya mengajarkan ilmu bela diri bagi anggota KPM melalui Silek. Silek merupakan salah satu ilmu bela diri tradisional yang bisa digunakan untuk membentengi diri dari segala bentuk pelecehan. Imah juga mengajarkan Randai dan bermain alat tradisonal Minangkabau bagi perempuan muda. Karena menurut Imah, perempuan muda harus tahu dengan budayanya. Siapa lagi yang akan melanjutkan budaya daerah jika bukan anak mudanya. Dengan adanya kegiatan yang digerakkan oleh Imah, perempuan muda menjadi lebih aktif dan kreatif.

Jika ada Kegiatan Aksi Bersama yang dilakukan oleh LP2M, Imah bersama KPM Jorong Melur selalu diikutsertakan untuk mempersembahkan Randai dan Silek. Hal ini membuat Imah dan KPM lebih percaya diri dan dikenal luas oleh daerah lainnya. Imah berharap, tidak hanya KPM Jorong Melur, namun Forum Perempuan Muda (FPM) Kab. Tanah Datar juga bisa bergabung dengan Jorong Melur untuk belajar kesenian tradiosional Minangkabau. Sehingga jika ada kegiatan, bukan hanya perempuan muda dan laki-laki muda Jorong Melur yang tampil , melainkan FPM Kab. Tanah Datar. “Saya bersedia untuk mengorbankan waktu dan tenaga untuk mengajarkan perempuan muda Tanah Datar agar mengenal dan mencintai kesenian Minangkabau” ungkap Imah penuh semangat. Melalui kesenian Minangkabau, Imah terus mengkampanyekan pentingnya HKSR dan Gizi bagi perempuan dan laki-laki muda.

“ Andragogi: Penghormatan Pengalaman Perempuan ”

Ditulis oleh : Sutiyem, Staf Lapang APM Jambi

Saya bernama Astina Pasaribu, tinggal di desa Meranti Kecamatan Renah Pamenang Kab.Merangin. Aktifitas sehari – hari saya selain sebagai ibu Rumah tangga juga aktif melakukan pelayanan sekolah minggu di gereja dan Guru Agama Kristen di SMAN 5 Merangin. Di desa Meranti terdapat kelompok dampingan APM bernama Community Center Merpati Mandiri, dan kawan – kawan anggota kelompok mempercayakan kepada saya untuk menjadi ketua kelompok. Sebagai pengurus kelompok, tentu saya sering terlibat untuk mewakili kelompok dalam kegiatan – kegiatan yang diadakan oleh APM. Baik kegiatan yang bersifat peningkatan kapasitas, ataupun karena saya juga sebagai pelaksana FKPAR Jambi. sehingga kegiatan loby –



loby bersama pelaksana APM ke instansi terkaitpun sering saya ikuti. Keterlibatan saya dalam beberapa kegiatan yang diadakan APM dalam program Mampu tersebut adalah: Rapat Pengurus FKPAR Sumatra Dampingan Permampu di Medan, dilibatkan dalam audiensi dengan DPRD, BPMPD, dan Bapeda, Rapat Kerja FKPAR Jambi; sebagai Ketua Pelaksana FKPAR Jambi, Perayaan Hari Kesehatan Seksual Internasional 2018, Diskusi reguler di CC.Merpati Mandiri, dll.

Melihat satu tahun ke belakang, banyak perubahan-perubahan yang sudah terjadi pada diri saya dengan adanya program ini, yaitu semakin percaya diri, bertambah relasi dan pengalaman, memahami metode pendidikan orang dewasa, terlibat dalam audiensi dan melloby ke pemerintah dan memahami hak – hak perempuan dan anak.

Di antara perubahan-perubahan diatas itu, perubahan yang paling penting menurut saya adalah pemahaman saya tentang metode pendidikan orang dewasa dan adanya hak – hak sebagai perempuan dan anak. Karena kedua perubahan ini benar – benar perubahan yang menjadi dasar dalam kehidupan saya sehari – hari baik saya sebagai perempuan, pelayan, maupun guru.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan itu adalah adanya kesempatan yang diberikan oleh APM kepada saya untuk melakukan pengembangan diri melalui diskusi – diskusi kritis, pendidikan, terlibat langsung dalam proses advokasi/praktek, dan motivasi serta pendampingan yang mereka lakukan secara konsisten.

Saya yakin, perubahan perubahan penting yang terjadi pada diri saya itu akan bermanfaat dalam pekerjaan maupun kehidupan saya sehari – hari di masa yang akan datang. Rasa percaya diri membuat saya yakin ketika akan melangkah dan mengambil keputusan penting, sedangkan metode pendidikan orang dewasa yang saya peroleh akan saya terapkan dalam memimpin kelompok CC maupun FKPAR, dalam pelayanan, Sekolah Minggu maupun dalam mengajar siswa. Selama ini mungkin dalam mengajar saya lebih banyak menggurui, kurang dalam hal mendengarkan pendapat orang lain. Begitu juga dengan pemahaman saya tentang hak – hak kita sebagai perempuan, membuat saya lebih peduli dan terpanggil jika ada ketidakadilan yang terjadi di sekitar saya. Perubahan besar yang terjadi pada diri saya, kiranya berdampak baik bagi orang lain, hingga akhirnya dari "saya" berubah menjadi "Kita".

Memutus Perkawinan Anak di Kab. Seluma

Ditulis oleh: Tini Rahayu, Staf Cahaya Perempuan WCC

Teman-teman dan di lingkungan kerja saya dipanggil Meli, lengkapnya Meliatian Sukaisih 38th. Saya mulai mengenal dan terlibat dengan program HKSR yang dijalankan Cahaya Perempuan WCC Bengkulu sejak awal 2016 lalu. Ketika itu saya masih dibagian Kesehatan ibu dan gizi Dinas Kesehatan kabupaten Seluma. Sejak saat itu hampir setiap bulan berkoordinasi dan melakukan kegiatan bersama baik yang difasilitasi oleh Cahaya Perempuan WCC maupun kegiatan yang dilakukan Dinas Kesehatan

Kabupaten Seluma. Mulai Januari 2017 saya dipromosikan mengisi Kepala Bidang Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak di DP3A & KB Pemda Kabupaten Seluma, hingga sekarang.



Sering berdiskusi dan terlibat dengan teman-teman Cahaya Perempuan WCC banyak memberi masukan dalam merancang kegiatan dan terlibat langsung pada dialog kebijakan anggaran dengan legislative terutama untuk anggaran yang responsif gender. Bernegosiasi dengan unsur pimpinan dan Ketua Komisi II yang juga panitia penganggaran merupakan pengalaman baru bagi saya. Memaparkan data dan mempertahankan argumentasi keberadaan program ternyata sesuatu yang harus diperjuangkan dalam politik penganggaran. Tanpa proses tersebut perebutan APBD yang angkanya terbatas, tidak akan berpihak pada pemenuhan HKSR untuk perempuan dan anak.

Dibandingkan dengan kabupaten lainnya, kabupaten Seluma memang kabupaten yang termasuk tertinggal dan miskin. Pengalaman saat di Dinas Kesehatan saya sudah mengetahui tingginya angka kematian ibu, kematian bayi, gizi buruk dan banyaknya ibu hamil mengalami kekurangan energi kronis sejak 2014 lalu. Hasil riset persoalan gizi yang dilakukan oleh CP WCC pada perempuan dewasa dan muda memperlihatkan persoalan pengetahuan soal kespro dan kesehatan seksual pada perempuan dewasa serta perempuan muda sangat minim. Ini yang memicu pernikahan usia anak tertinggi kedua di propinsi Bengkulu. Setiap tahunnya lebih dari 400 remaja yang menikah usia dini, persoalan ini pasti akan berdampak pada tingginya aborsi tidak aman, AKI, AKB, gizi buruk ibu hamil KEK, KDRT dan perceraian. Salah satu rekomendasi dari hasil riset persoalan gizi di pertengahan 2017 lalu, akan mendorong kebijakan pencegahan perkawianan usia anak di kabupaten Seluma. Hasil penelitian yang dilakukan ini, kami gunakan sebagai data pendukung untuk mendorong lahirnya peraturan bupati tentang pencegahan perkawinan anak. Saya sempat kecewa dan ragu setelah mengikuti pertemuan awal untuk menggagas rancangan Perbup pencegahan perkawinan anak di September 2017. Kuatnya penolakan dari para petugas KUA, tokoh Agama dan tokoh Adat saat itu. Tetapi kata kuncinya, yang harus dijawab bersama adalah apa yang harus kita lakukan untuk pencegahan ke depan, bukankah tujuan perkawinan itu membangun rumah tangga yang bahagia.

Setelah melewati tiga kali pertemuan degan perdebatan yang panjang, mulai terlihat ada kesepahaman dan mulai perumusan subtansi kebijakan yang akan diatur dalam rancangan Perbup. Perdebatan panjang juga kami alami dengan bagian hukum SETDA Kabupaten Seluma. Bagian hukum mempertimbangkan akan terjadi gugatan dari pihak KUA dan tokoh agama berdasarkan UU No 1 th 1974 tentang Perkawinan terutama pasal 6 dan 7.

Di penghujung Juli 2018 Bupati menandatangani Perbup Nomor 27 tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak kabupaten Seluma. Setelah itu pada 12 November 2018 penetapan Rencana Aksi Daerah serta Bupati membuat Surat Edaran dengan No 180/342/SE/B2/DP3APP&KB/IX/2018 untuk semua OPD dan pemerintahan kecamatan. Saya berharap dengan tiga kebijakan ini akan memperkuat program dan

upaya bersama antar OPD, ORMAS, LSM dan kelompok masyarakat bersama melakukan upaya pencegahan perkawinan usia anak. Sehingga ke depan angka AKI, AKB gizi buru, KDRT dan perceraian di Kabupaten Seluma bisa berkurang.

Keberhasilan keluarnya Perbup Seluma merupakan kerjasama yang sangat baik dari lembaga pemerintah daerah dan tentunya lembaga non pemerintah daerah seperti Cahaya Perempuan WCC (CPWCC). Tanpa adanya dukungan dari semua pihak, saya rasa tidak akan lahir peraturan tersebut. Berkat kepedulian CP WCC terhadap wilayah Kab. Seluma terutama untuk persoalan perkawinan anak yang membuat saya merasa tidak melakukan perjuangan sendiri dan harapanya setelah lahirnya Perbup ini digunakan sebagai dasar hukum untuk mengurangi angka Perkawinan Anak di Kabupaten Seluma.

"Kecil Bukan Berarti Tak Berguna ! Sadar Kesehatan Alat Reproduksi Lahirkan Dampak Besar"

Ditulis oleh : Yesi Ariyani, Staf WCC Palembang



Saya R. A. Nurul Furqon, usia 21 tahun mahasiswi di UIN Raden Patah, Palembang. Awalnya, saya hanya diajak teman saya untuk mengikuti suatu kegiatan untuk membentuk suatu wadah/arena untuk berbagi pengalaman, pengetahuan dan informasi dengan teman sebaya. Saya tertarik ketika teman saya menyampaikan bahwa akan ada banyak informasi seperti apa itu gender, kesehatan reproduksi, seksualitas dll; dan akhirnya saya memutuskan untuk bergabung dan mengikuti kegiatan tersebut. Kelompok perempuan muda dibentuk pada bulan November 2017 dan disepakati bernama Generasi Perempuan Cerdas Sriwijaya (GPCS) Kota Palembang dan saya terpilih menjadi salah satu pengurus dikelompok tersebut dengan jabatan sebagai wakil ketua. Pasca dibentuknya kelompok perempuan muda harapannya akan lahir perempuan-perempuan yang berkarakter cerdas yang tentu saja mampu memberikan perlindungan dan rasa aman bagi perempuan lain. Bukan hanya itu, perempuan muda diharapkan mampu memutus rantai kekerasan terhadap perempuan jika sudah diberikan pembekalan sedini mungkin. Pada tahun kedua "GPCS" yaitu di tahun 2018 saya diberikan kepercayaan untuk mengkoordinir teman-teman sebagai leader/Ketua GPCS, dengan harapan kelompok ini akan menjadi lebih maju dan tentu saja akan terus melahirkan perempuan-perempuan yang faham dan sadar akan pentingnya hak-hak perempuan yang seharusnya terpenuhi tanpa harus direnggut.

Banyak sekali perubahan pribadi yang saya rasakan. Mulai dari hal yang paling sederhana sampai hal yang saya rasa menjadi perubahan besar. Pertama, semenjak terlibat didalam kelompok perempuan muda "GPCS", saya merasakan bahwa saya lebih percaya pada potensi diri saya dan tentu tidak takut bahkan ragu untuk menyampaikannya. Seperti berbicara di depan khalayak ramai, menjadi pembicara yang menurut saya merupakan hobby, passion dan kegemaran saya, namun sering kali ragu untuk saya ekspresikan. Kedua, hal yang terjadi pada diri saya adalah lebih pekanya terhadap kesehatan dan kebersihan alat reproduksi. Ternyata kesehatan alat reproduksi memberikan dampak yang luar biasa. Dengan keadaan yang bersih dan sehat

menimbulkan rasa nyaman. Hal sederhananya, awalnya saya sering lalai untuk masalah pembalut, saya tahu bahwa seharusnya pembalut itu harus diganti min 3 jam sekali; namun sebelum terlibat didalam kegiatan WCC Palembang saya tidak pernah peka dan perhatian pada alat reproduksi saya, dan sering kali hanya menggantinya bukan dengan waktu yg seharusnya. Namun, setelah saya ikut berbagai kegiatan, seminar, diskusi kritis bahkan pelatihan yang diadakan atau difasilitasi oleh WCC Palembang, saya baru sadar bahwa alat reproduksi saya juga mempunyai hak untuk dirawat, dijaga dan juga terus dibersihkan. Pada akhirnya, saya mencoba menerapkan pola hidup sehat bukan hanya bagi alat reproduksi saja tetapi seluruh tubuh saya. Saya mulai disiplin dalam urusan pembalut dan juga menghindari menggunakan celana yang terlalu ketat karena itu tidak bagus bagi kesehatan. Mulai menjaga pola makan, istirahat yang teratur, mengatur stres agar tidak menimbulkan efek buruk dan tentunya selalu mencari tahu apa yang belum saya diketahui untuk terus memenuhi hak-hak yang seharusnya sudah saya dapatkan sejak dulu. Karena saya yakin jika saya sehat dan semua hak-hak reproduksi saya sudah terpenuhi saya akan mendapatkan kebahagiaan nantinya, dan tentunya dengan tubuh yang sehat saya berharap saya mampu memberikan sedikit inspirasi dan juga berbagi ilmu bagi perempuan-perempuan diluar sana yang masih memerlukan pelukan hangat dari kita.

Selain itu hal yang juga sangat berharga yang terjadi pada diri saya adalah saya sekarang lebih memahami dan juga memiliki bekal untuk nanti jika saya membangun rumah tangga. Bagaimana berkomunikasi dengan pasangan, bagaimana menciptakan keadaan saling mengerti dan tidak ada diskriminasi dalam rumah tangga dan tentunya bagaimana hubungan yang sehat baik hubungan terkait reproduksi maupun urusan hati yang saling berkaitan dan yang paling penting perubahan yang saya rasakan adalah tumbuhnya kesadaran saya untuk terus menjaga dan merawat alat reproduksi. Mengapa? Karena hal ini bukan hanya akan bermanfaat sekarang namun juga akan memberikan dampak ke depannya bagi kehidupan saya. Karena alat reproduksi yang sehat akan memberikan senyum bahagia yang selalu melekat.

Saya yakin perubahan kecil ini akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi saya dan mungkin bagi banyak orang. Dari segi pekerjaan jika alat reproduksi sehat akan dengan mudah saya untuk beraktifitas dan dengan nyaman melakukan tugas dan kewajiban saya sebagai mahasiswi dan juga sebagai aktivis yang membela hak-hak perempuan.

Aku Berani, Aku Tidak Takut Berorganisasi. Aku Perempuan!!

Ditulis Oleh: Anggi Herliani, Staf Penguatan Jaringan Lembaga Advokasi Perempuan Damar

'Selamat pagi, apa kabar?' Aku senang menggunakan kata sapaan itu, karena membakar semangatku sepanjang hari. Namaku Siska Maylani, perempuan kelahiran Panjang Asli pada 28 tahun silam. Aku termasuk perempuan yang senang bergaul dengan orang lain. Pada tahun 2008 aku diperkenalkan dengan sebuah organisasi perempuan yang bernama Serikat Perempuan Bandarlampung (SPBL) oleh seorang teman. Saat itu aku masih seorang gadis belia yang sedang menempuh pendidikan di SMA. Aku senang berkumpul dengan teman-teman yang lain dan berdiskusi membahas tema-tema perempuan yang sedang tren dikalangan remaja.

Tahun 2014 aku dipertemukan dengan jodohku, aku menikah. Saat ini aku mempunyai seorang putri cantik kecil yang kunamai Miska.



Setelah menikah, kegiatan berorganisasiku di SPBL menurun. Hal ini disebabkan karena aku takut akan suamiku yang tidak mengizinkan aku pergi diskusi dan bisa menelantarkan anak. Apalah daya, aku takut dan sempat vakum dari organisasi. Ketika anakku sudah agak besar dan bisa diajak pergi, aku memutuskan untuk diam-diam ikut pertemuan rutin seperti sebelumnya.

Di salah satu pertemuan rutin tersebut aku mendapatkan pengetahuan tentang adil gender, dimana ada pembagian peran dalam keluarga. Pengetahuan yang kudapat pelan-pelan aku ceritakan kepada suami, dan siapa tahu suami dan keluargaku bisa mengerti dan bahkan ikut mendukung. Aku semakin bersemangat aktif kembali dalam organisasi. Hingga akhirnya, saat ini aku dipilih untuk menjadi anggota Divisi Kebijakan dan Reformasi SPBL. Semakin lama aku ikut diskusi-diskusi, selain perubahan yang ada pada diri suami dan keluarga, aku sendiri pun ikut merasakan perubahannya. Semakin banyak diskusi tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi dengan tenaga kesehatan aku jadi tidak takut lagi untuk melakukan tes IVA. Hal ini aku lakukan semata-mata karena aku sadar akan kesehatan reproduksi.

Karena keaktifanku di diskusi rutin bulanan yang diselenggarakan Serikat Perempuan Bandarlampung (SPBL) bersama DAMAR melalui program PERMAMPU dengan dukungan dari kemitraan Australia-Indonesia untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (MAMPU), aku sering diajak mengikuti pelatihan-pelatihan oleh Serikat Perempuan Bandarlampung (SPBL) dan DAMAR, diantaranya Pendidikan Adil Gender dan Anti Kekerasan; Pendidikan Analisa Sosial dan Feminisme; Pendidikan Advokasi dan Pengorganisasian dan Pendidikan Kepemimpinan Perempuan dan Tata Kelola Organisasi.

Pelatihan yang aku ikuti membuat aku mempunyai pengetahuan terkait kepemimpinan dan hak-hak perempuan. Selain itu, aku juga ikut serta dalam Aksi 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Survey Gizi. Hal ini menjadi factor pendukung adanya perubahan pada diriku dan keluargaku. Banyak perubahan yang dirasakan baik secara pribadi tentunya dengan peningkatan pengetahuan, kesadaran kritis dalam menganalisis bahwa persoalan perempuan terutama kesehatan seksual dan reproduksi berkaitan dengan situasi ketidakadilan gender, yang selama ini diyakini menjadi kesalahan perempuan yang tidak cepat mengambil keputusan, tidak mau memeriksakan kehamilan dan percaya pada mitos-mitos.

Selain diskusi rutin, SPBL juga mempunyai kelompok Credit Union (CU). Aku tergabung menjadi salah satu anggotanya. Banyak manfaat yang kudapatkan setelah aku mengikuti kelompok CU ini diantaranya pengetahuan tentang ekonomi rumah tangga dan belajar menabung demi kesejahteraan rumah tangga. Saat ini aku mempunyai usaha kecil-kecilan yang menjual cilok, mie ayam, es rasa- rasa, mie jablay, dan bakso ikan. Modal kudapatkan dari hasil meminjam di CU sebesar Rp 500.000. Walaupun masih kecil-kecilan aku bersyukur bisa menjadi perempuan yang mandiri dan membantu perekonomian keluarga.

Banyak manfaat yang aku dapatkan dari berorganisasi, terima kasih semuanya. Aku berani, aku tidak takut berorganisasi. Aku perempuan!

VISI KONSORSIUM PERMAMPU

Perempuan mengalami dan menikmati pemenuhan perlindungan dan penghormatan Hak Kesehatan Seksual & Reproduksi (HKSR) yang lebih baik.

TUJUAN 1
Perempuan akar rumput (pedesaan, miskin kota, muda/usia 12-20 tahun mempunyai kekuatan kolektif dan kekuatan ekonomi untuk pemenuhan HKSR).

TUJUAN 2
Perempuan mendapatkan kemudahan akses dalam pelayanan HKSR yang mudah, cepat, tepat dan bermutu.

TUJUAN 3
Institusi keluarga, adat dan agama melakukan perubahan aturan adat dan tafsir agama terkait HKSR (FMS).

TUJUAN 4
Pemerintah Desa dan Kab/Kota membuat kebijakan untuk pemenuhan dan perlindungan HKSR.

WILAYAH CAKUPAN PROGRAM PERMAMPU



SEKRETARIAT PERMAMPU
Jl. Pancur Siwah No 1G Padang Bulan KM 8 Medan 20142 - Sumatera Utara
Telp/Fax. 061-8361102 e-mail : konsorsiumpermampu@gmail.com
www.permampu.org Facebook: PermampuConsurtium